

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan yang masuk kategori perbankan syariah periode 2016-2019. Berikut merupakan gambaran umum mengenai perusahaan yang termasuk dalam penelitian:

##### **4.1.1. PT. Bank Negara Indonesia Syariah**

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

##### **4.1.2. PT. Bank Mega Syariah**

Bank Mega Tbk (MEGA) didirikan 15 April 1969 dengan nama PT Bank Karman dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1969. Kantor pusat Bank Mega berlokasi di Menara Bank Mega, Jl. Kapten Tendean 12-14A, Jakarta 12790 – Indonesia. Bank Mega memiliki 53 kantor cabang,

289 kantor cabang pembantu dan 7 kantor kas. Pemegang saham yang memiliki

5% atau lebih saham Bank Mega Tbk adalah PT Mega Corpora (induk usaha), dengan kepemilikan sebesar 57,87%. Induk usaha terakhir Bank Mega adalah CT Corporation (dahulu Para Group). Saham CT Corporation dimiliki 100% oleh Chairul Tanjung & Keluarga. Bank Mega memperoleh izin usaha sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1969. Pada tanggal 2 Agustus 2000, Bank Mega memperoleh izin untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai wali amanat dari BAPEPAM-LK. Kemudian tanggal 31 Januari 2001, memperoleh izin sebagai bank devisa dari Bank Indonesia.

#### **4.1.3. PT. Bank Muamalat Indonesia**

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyalang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai

lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

#### **4.1.4. PT. Bank Syariah Mandiri**

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997/1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

#### **4.1.5. PT. Bank Central Asia Syariah**

Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang

dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, .PT.Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah. Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 0,0003% dimiliki oleh PT BCA Finance. Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No.12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.

#### **4.1.6. PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah**

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Dua tahun lebih PT. Bank BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah. Kehadiran PT. Bank BRISyariah di tengah-tengah industri

perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

#### **4.1.7. PT. Bank Jawa Barat Banten Syariah**

Pendirian bank bjb syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah. Sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. maka pada tanggal 15 Januari 2010 didirikan bank bjb syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010.

#### **4.1.8. PT. Bank Panin Syariah**

Bank Panin Dubai Syariah Tbk (dahulu Bank Panin Syariah Tbk) (PNBS) didirikan di Malang tanggal 08 Januari 1972 dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja. Kantor pusat PNBS beralamat di Gedung Panin Life Center Lt.3 Jl. Letjend S. Parman Kav.91 Jakarta Barat 11420 – Indonesia

dan memiliki 25 kantor cabang. PNBS beberapa kali melakukan perubahan nama, antara lain:

- 1) PT Bank Pasar Bersaudara Djaja, per 08 Januari 1972
- 2) PT Bank Bersaudara Jaya, per 08 Januari 1990
- 3) PT Bank Harfa, per 27 Maret 1997
- 4) PT Bank Panin Syariah, per 03 Agustus 2009
- 5) Bank Panin Dubai Syariah Tbk, 11 Mei 2016.

PNBS memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia tanggal 6 Oktober 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada tanggal 02 Desember 2009. Bank Panin Dubai Syariah Tbk juga telah mendapat persetujuan menjadi bank devisa dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 08 Desember 2015. Induk usaha PNBS adalah Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) (PNBN), sedangkan induk usaha terakhir adalah PT Panin Investment.

#### **4.1.9. PT. Bank Syariah Bukopin**

PT Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pindahan Kantor Bank.

#### **4.1.10. PT. Bank Victoria Syariah**

Bank Victoria International Tbk (BVIC) didirikan 28 Oktober 1992 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 05 Oktober 1994. Kantor pusat Bank Victoria berlokasi di Panin Tower – Senayan City, Lantai 15, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 10270 – Indonesia. Saat ini, Bank Victoria memiliki 1 kantor cabang utama, 8 kantor cabang, 67 kantor cabang pembantu dan 27 kantor kas Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Victoria International Tbk, yaitu: Victoria Investama Tbk (pengendali) (VICO) (45,43%), Suzanna Tanojo (pengendali) (10,17%) dan DEG - Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft mbH (9,00%). Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BVIC adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan. Bank Victoria memperoleh izin usaha sebagai bank umum dan sebagai pedagang valuta asing, masing-masing pada tanggal 10 Agustus 1994 dan 25 Mei 1997.

#### **4.1.11. PT. Bank Maybank Syariah Indonesia**

Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h Bank Internasional Indonesia Tbk / Bank BII) (BNII) didirikan 15 Mei 1959. Kantor pusat Bank Maybank beralamat di Sentral Senayan III, Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno – Senayan, Jakarta 10270 – Indonesia. Bank Maybank memiliki 1 kantor pusat, 81 kantor cabang, 313 kantor cabang pembantu, 1 kantor cabang pembantu mikro, 23 kantor fungsional mikro, 1 kantor kas, 7 kantor cabang Syariah dan 2 kantor cabang pembantu Syariah. Pada tanggal 31 Maret 1980 Bank Maybank melakukan penggabungan usaha (merger) dengan PT Bank Tabungan Untuk Umum 1859, Surabaya. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Maybank Indonesia Tbk, yaitu: Sorak Financial Holdings Pte. Ltd (45,02%), Maybank Offshore Corporate Service (33,96%) dan UBS AG London (18,31%). Pemegang pengendali utama Bank Maybank Indonesia adalah Malayan Banking Berhad (Maybank). Maybank mengendalikan Bank Maybank Indonesia melalui Sorak Financial Holdings Pte. Ltd dan Maybank Offshore Corporate Service (Labuan) Sdn. Bhd. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang

lingkup kegiatan BNII adalah melakukan usaha di bidang perbankan, dan melakukan kegiatan perbankan lainnya berdasarkan prinsip Syariah. Bank Maybank mulai melakukan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah sejak bulan Mei 2003.

## 4.2 Analisis Data

### 4.3.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan menjelaskan deskripsi data dari seluruh variabel yang akan dimasukkan dalam model penelitian. Tabel 4.1 menunjukkan hasil statistik deskriptif dari variabel-variabel dalam penelitian ini. Informasi mengenai statistik deskriptif tersebut meliputi : Nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Statistik deskriptif untuk variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tertera pada tabel 4.1 berikut;

**Tabel 4.1 Hasil Uji Descriptive Statistics**

	<b>KEM</b>	<b>KEI</b>	<b>DK</b>	<b>KA</b>	<b>DER</b>	<b>Cash flow</b>	<b>Growth</b>	<b>M. Laba</b>
<b>No. Obs</b>	44	44	44	44	44	44	44	44
<b>Mean</b>	0,771	2,128	0,230	1,987	0,170	0,956	0,620	0,121
<b>Maximum</b>	0,821	1,580	8	6	0,942	0,637	0,752	0,231
<b>Minimum</b>	4,886	9,321	4	3	1,797	0,837	0,209	0,029
<b>Stdev</b>	-2,515	0,632	0,876	0,775	-0,363	-0,893	1,210	0,661

Sumber : Data diolah, 2021

Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari jumlah 44 sampel perusahaan perusahaan selama periode pengamatan (2016-2019) dapat disimpulkan bahwa pada tabel diatas menunjukkan pada variabel manajemen laba



memiliki nilai minimum sebesar 0,029 nilai maksimum sebesar 0,0231 dengan nilai rata-rata manajemen laba sebesar 0,121 dan standar deviasi sebesar 0,661.

Pada variabel kepemilikan manajerial nilai minimum sebesar 0,021 nilai maksimum sebesar 0,886 dengan nilai rata-rata kepemilikan manajerial sebesar 0,771 dan standar deviasi sebesar -0,515.

Pada variabel kepemilikan institusional nilai minimum sebesar 0,080 nilai maksimum sebesar 0,921 dengan nilai rata-rata kepemilikan institusional sebesar 0,828 dan standar deviasi sebesar 0,632.

Pada variabel dewan komisaris nilai minimum sebesar 4 nilai maksimum sebesar 8 dengan nilai rata-rata dewan komisaris sebesar 0,230 dan standar deviasi sebesar 0,876.

Pada variabel komite audit nilai minimum sebesar 3 nilai maksimum sebesar 6 dengan nilai rata-rata komite audit sebesar 0,187 dan standar deviasi sebesar 0,775.

Pada variabel *cash flow* nilai minimum sebesar 0,131 nilai maksimum sebesar 0,837 dengan nilai rata-rata *cash flow* sebesar 0,956 dan standar deviasi sebesar -0,363.

Pada variabel *sales growth* nilai minimum sebesar 0,209, nilai tertinggi sebesar 0,752 dengan nilai rata-rata *sales growth* sebesar 0,620 dan standar deviasi sebesar 1,210. Tingginya nilai maksimum *sales growth* menjelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi selalu diikuti dengan peningkatan dana yang digunakan untuk pembiayaan ekspansi. Besar kecilnya pertumbuhan penjualan perusahaan akan mempengaruhi jumlah laba yang diperoleh.

### 4.3 Pemilihan Model Regresi Berganda Data Panel

#### 4.4.1 Uji *Chow* (F test)

Untuk mengetahui model mana yang lebih baik dalam pengujian data panel, bisa dilakukan dengan penambahan variabel *dummy* sehingga dapat diketahui bahwa intersepanya berbeda dapat diuji dengan uji Statistik F. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode *Fixed Effect* lebih baik dari regresi model data panel tanpa variabel *dummy* atau metode *Common Effect*. Hipotesis pada uji ini adalah bahwa intersep sama, atau dengan kata lain model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Common Effect*, dan hipotesis alternatifnya adalah intersep tidak sama atau model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Fixed Effect*. Nilai Probabilitas untuk *Crosssection* F. Jika nilainya  $> 0.05$  maka model yang terpilih adalah CE, tetapi sebaliknya jika  $< 0.05$  maka model yang terpilih adalah FE.

Hasil uji *chow* dalam penelitian ini tetera pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

**Table 4.2 Uji Chow**

<b>Prob-F</b>	<b>Keputusan</b>	<b>Model Regresi</b>
0,0002	Ho diterima	<i>Fixed Effect</i>

Sumber : Data diolah,2021

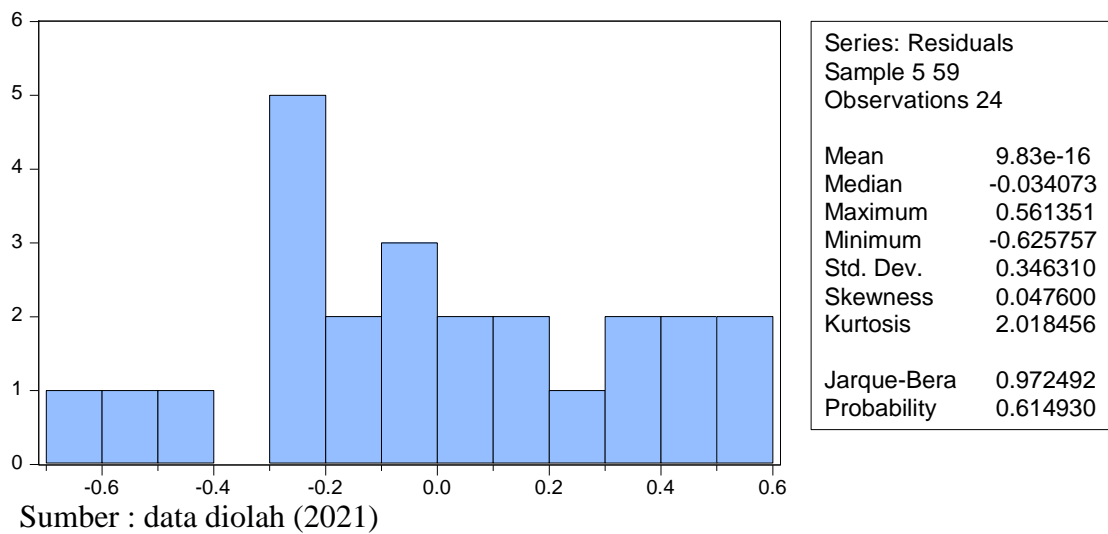
Berdasarkan Tabel 4.2 nilai probabilitas untuk *Cross-section* F yaitu sebesar  $0,002 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berdasarkan hasil Tabel 4.2 maka dapat disimpulkan model yang terpilih yaitu model *fixed effect model*.

### 4.4 Uji Asumsi Klasik

#### 4.4.1 Hasil Uji Normalitas Data

Menurut Imam Ghozali (2011), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi. Hasil uji statistik dalam penelitian ini menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) tertera pada :

**Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Data  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**



Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji nilai *Probability Jarque Bera* sebesar 0,6149 lebih besar dari 5% (0.05) maka  $H_0$  diterima artinya data residual berdistribusi Normal. Sehingga dapat dinyatakan bahwa residual pada model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal.

#### 4.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal variabel. Hasil matriks korelasi antara

variabel bebas dan perhitungan nilai korelasi untuk model regresi tertera pada yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas**

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.000482	19.88437	NA
KEM	2.44E-06	6.802916	1.101557
KEI	7.02E-06	12.17616	1.019402
DK	4.01E-05	3.221903	1.084641
KA	2.11E-05	4.876512	1.187901
CS	3.50E-06	5.111188	1.810099
Growth	3.70E-06	3.717603	1.200917

Sumber : Data sekunder diolah,2021

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas pada Tabel 4.4 diatas diperoleh hasil berupa nilai korelasi dari masing masing variabel  $< 0,8$  artinya tidak terjadi multikolinearitas. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas.

#### 4.4.3 Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya) (Ghozali, 2011). Penelitian ini menggunakan Nilai DW (*Durbin Watson*). Dengan hasil uji sebagai berikut :

**Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi**

Mean dependent var	-0.002167
S.D. dependent var	0.037692
Akaike info criterion	-3.631760
Schwarz criterion	-3.492137
Hannan-Quinn criter.	-3.577146
Durbin-Watson stat	2.329480

Sumber : Data sekunder diolah,2021

Dari hasil output di atas didapat nilai DW yang dihasilkan dari model regresi adalah 2,329. Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 diperoleh nilai  $dL$  sebesar 1,48 dan  $dU$  sebesar 1,69,  $dU < DW < (4-dL)$   $1,69 < 2,329 < (4,48)$  yang berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

#### 4.5.2 Model Regresi Linier Berganda

Pengujian dilakukan menggunakan uji regresi linier berganda dengan  $\alpha=5\%$ .

Hasil pengujian disajikan pada Tabel 4.6 berikut ini:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Persamaan Analisis Regresi Linier Berganda**

Variabel	Coefficient t	t – statistics	t – tabel
KEM	-0,0451 <sup>**</sup>	-4,3615	1,660
KEI	1,0767 <sup>**</sup>	5,9178	1,660
DK	0,2343 <sup>**</sup>	0,9293	1,660
KA	0,0110 <sup>**</sup>	0,4012	1,660
DER	0,0655 <sup>**</sup>	0,5305	1,660
CF	-0,2237 <sup>**</sup>	-0,8159	1,660
Growth	-1,0842 <sup>**</sup>	-2,1874	1,660
R-squared	0,9654		
F-statistics	9,0815		
Prob ( f- Statistic)	0,0012		

Keterangan :

\* Signifikan pada tingkat 10%

\*\* Signifikan pada tingkat 5%

\*\*\* Signifikan pada tingkat 1%

Sumber : Data diolah, 2021

Pada Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai Prob (f- Statistic) memiliki nilai sebesar 0.0012, angka ini lebih kecil dari nilai  $\alpha=5\%$ , dengan demikian dapat dikatakan bahwa model regresi pada penelitian ini layak digunakan.

Berdasarkan Tabel 4.6 didapat perhitungan pada kepemilikan manajerial diperoleh nilai t-statistic > t-tabel yaitu  $-4,361 > -1,660$ . Hasil ini mengartikan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba pada

perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

Berdasarkan Tabel 4.6 didapat perhitungan pada kepemilikan institusional diperoleh nilai  $t\text{-statistic} > t\text{-tabel}$  yaitu  $5,917 > 1,660$ . Hasil ini mengartikan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

Berdasarkan Tabel 4.6 didapat perhitungan pada dewan komisaris diperoleh nilai  $t\text{-statistic} > t\text{-tabel}$  yaitu  $0,929 < 1,660$ . Hasil ini mengartikan bahwa variabel dewan komisaris tidak berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

Berdasarkan Tabel 4.6 didapat perhitungan pada komite audit diperoleh nilai  $t\text{-statistic} > t\text{-tabel}$  yaitu  $0,401 < 1,660$ . Hasil ini mengartikan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

Berdasarkan Tabel 4.6 didapat perhitungan pada *leverage* diperoleh nilai  $t\text{-statistic} > t\text{-tabel}$  yaitu  $0,530 < 1,660$ . Hasil ini mengartikan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

Berdasarkan Tabel 4.6 didapat perhitungan pada *cash flow* diperoleh nilai  $t\text{-statistic} > t\text{-tabel}$  yaitu  $-0,815 < 1,660$ . Hasil ini mengartikan bahwa variabel *cash flow* tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap

manajemen laba pada perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

Berdasarkan Tabel 4.6 didapat perhitungan pada *sales growth* diperoleh nilai  $t\text{-statistic} > t\text{-tabel}$  yaitu  $-2,187 > -1,660$ . Hasil ini mengartikan bahwa variabel *sales growth* berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

## 4.6 Pembahasan

### 4.6.1 Kepemilikan Manajerial terhadap manajemen laba

Kepemilikan manajerial yaitu kepemilikan saham suatu perusahaan oleh pihak manajemen. Manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Kepemilikan saham yang rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat.

Penelitian Kouki *et al* (2018) mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dan bisa meningkatkan kualitas dari proses pelaporan keuangan, hal ini dikarenakan ketika manajer juga memiliki porsi kepemilikan, maka mereka akan bertindak sama seperti pemegang saham umumnya dan memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan wajar dan mengungkapkan kondisi riil perusahaan. Hasil penelitian Jao (2014), Mahariana dan Ramantha (2014) dan Sari (2015) juga menemukan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai hubungan negatif dengan manajemen laba. Berdasarkan hasil beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial akan semakin mengurangi perilaku manajemen laba.

#### 4.6.2 Kepemilikan Institusional terhadap manajemen laba

Tingkat efektivitas pengelolaan sumber daya oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba, yang melalui mekanisme kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional bisa membuat proses monitoring secara efektif karena memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen sehingga mengurangi tindakan manajemen untuk melakukan manajemen laba. Karena memiliki presentase saham tertentu proses penyusunan laporan keuangan bisa dipengaruhi oleh institusi yang tidak menutup kemungkinan terdapat aktualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2015). Kepemilikan saham oleh investor institusional lebih mampu untuk mengawasi kegiatan karena investor ini dianggap sebagai investor yang berpengalaman (*sophisticated investor*) sehingga bisa mengurangi motivasi manajemen untuk melakukan kegiatan manajemen laba (Midiastuty dan Machfoedz 2013).

#### 4.6.3 Dewan Komisaris terhadap manajemen laba

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan (Ujiyantho dan Pramuka) dalam (Manik Tumpul, 2015) menyatakan bahwa *nonexecutive director* (Komisaris) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen.

Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang GCG. Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan kata lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Sementara dalam pengaturan BI No.8/4/PBI/2006 komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang memang benar-benar berada pada posisi netral dan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan kepentingan dengan



komisaris lainnya atau pihak yang dapat mengurangi posisi independensinya. Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.

#### **4.6.4 Komite Audit terhadap manajemen laba**

Komite merupakan organ yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Tujuan dibentuknya komite audit adalah untuk membantu komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan efektifitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Komite audit dalam menjalankan fungsinya harus memiliki hak terhadap akses tidak terbatas kepada direksi, auditor internal dan auditor eksternal dan semua informasi yang ada dalam perusahaan. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka komite audit berfungsi untuk membantu dewan komisaris menjadi intermediaries atau penghubung antara dewan komisaris dan auditor eksternal perusahaan (Cintia Yuniarti (2014)).

#### **4.6.5 Cash Flow terhadap manajemen laba**

*Free cash flow* merupakan kas yang tersedia diperusahaan yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas/kegiatan (Murhadi, 2013). *Free cash flow* ( arus kas bebas) merupakan arus kas yang benar-benar tersedia untuk dibayarkan kepada seluruh investor setelah perusahaan menepatkan seluruh investasinya pada aktiva tetap, produk- produk baru dan modal kerja yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasi yang sedang berjalan (Setiawati, *et,al* 2019). Perusahaan yang memiliki arus kas bebas (*free cash flow*) yang tinggi akan memiliki kesempatan yang lebih besar dalam melakukan manajemen laba dengan meningkatkan laba yang dilaporkan untuk menutupi tindakan dari pihak manajer yang tidak optimal dalam memanfaatkan kekayaan perusahaan. Berikut ini rumus untuk mencari *free cash flow* yaitu sebagai berikut : (Erma, *et.al*, 2019).

#### **4.6.6 *Leverage* terhadap manajemen laba**

*Leverage* merupakan rasio antara total kewajiban dengan total asset. Semakin besar rasio leverage, berarti semakin tinggi nilai utang perusahaan. perusahaan yang mempunyai rasio leverage yang tinggi, berarti proporsi hutangnya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi aktivasnya akan cenderung melakukan manipulasi dalam bentuk manajemen laba dengan tujuan untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang. Menurut Sulistyanto (2018) dalam teori keagenan, semakin dekat perusahaan dengan pelanggaran perjanjian utang yang berbasis akuntansi, lebih memungkinkan manajer perusahaan untuk memilih prosedur-prosedur akuntansi yang memindahkan laba yang dilaporkan dari periode masa datang ke periode sekarang. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* yang tinggi mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan manajemen laba.

#### **4.6.7 *Sales Growth* terhadap manajemen laba**

Pertumbuhan penjualan menunjukkan peningkatan penjualan dari tahun ke tahunnya. Jika penjualan dan laba setiap tahun meningkat, maka pembiayaan dengan utang dengan beban tetap tertentu akan meningkatkan pendapatan saham. Sehingga manajer terdorong untuk melakukan manajemen laba seiring dengan semakin tingginya pertumbuhan penjualan suatu perusahaan agar laba perusahaan nampak lebih rendah dari pada laba yang sesungguhnya diperoleh (Agung dan I Ketut, 2017). Pernyataan ini didukung oleh penelitian Sari (2015) yang menyatakan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.